

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DIKECAMATAN NOYAN KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
ARISTO BAHARI Y
NIM. E21111051

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: Bahary.aristocrat@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses implementasi program pembangunan sarana prasarana umum PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. Adapun yang menjadi identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan kurang efektif, pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal dan peluncuran dana PNPM Mandiri Perdesaan sering mengalami keterlambatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aspek yaitu Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, proses perencanaan program PNPM Mandiri Perdesaan kurang efektif, proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal dan proses peluncuran dana program PNPM Mandiri Perdesaan sering mengalami keterlambatan. Dalam upaya mengatasi permasalahan dari penelitian ini diharapkan sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan serta tim pelaksana kegiatan agar lebih ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan dan juga pengawasan yang ketat baik oleh masyarakat, badan pengawas kegiatan yang telah dibentuk maupun oleh pemerintah daerah.

Kata-kata kunci : PNPM Mandiri Perdesaan, Pengorganisasian, Interpretasi dan Aplikasi.

Abstract

The purpose of this study was intended to determine the process of implementation of public infrastructures development program PNPM Mandiri Perdesaan at Noyan districts Sanggau Regency. The identification of problems in this research is: The planning of program PNPM Mandiri Perdesaan less effective, implementation of the program PNPM Mandiri Perdesaan not maximum, and release of funds PNPM Mandiri Perdesaan are experiencing delays. The method used in this research is the descriptive method. To describe and analyze of problems in this study is using the theory of Charles O. Jones are consisting of three aspects that is Organizing, Interpretation and Application. The result of that obtained from this research is, the planning of process program PNPM Mandiri Perdesaan less effective, the process of program implementation PNPM Mandiri Perdesaan not maximum and the process of launching the program funds PNPM Mandiri Perdesaan are experiencing delays. An effort to overcome the problems of this study are expected dissemination to the public should be improved and the implementation team to be more enhanced through education and trainings, close supervision by the public, and also close supervision by the public, the regulatory body and the activities that have been established by local governments.

Keywords : PNPM Mandiri Perdesaan, Organizing, Interpretation and Application.

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan beberapa program lainnya merupakan rancangan RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, kearah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik, untuk kegiatan fisik dimuat pada bidang pembangunan Desa,

sedangkan untuk kegiatan non-fisik meliputi kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa (bidang oprasional Pemerintah Desa, oprasional BPD, oprasional RT dan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa), pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD) di Kabupaten Sanggau dimulai pada tahun 2007 yang pada saat itu merupakan perubahan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menjalani masa pengenalan atau fase Sosialisasi pada tahun 2002. Memasuki tahun anggaran 2007 hingga tahun anggaran 2015 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) telah berkibrah selama 9 (Sembilan) Tahun di Kecamatan Noyan.

Pengarahan dan perencanaan yang di musyawarahkan oleh tim implementor PNPM-Mpd Kecamatan dirasa belum dapat diterima serta dilaksanakan masyarakat sehingga hal ini menyebabkan masyarakat belum mengerti tentang maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam merealisasikan suatu kegiatan masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut karena masyarakat sangat mengharapkan imbalan atau upah kerja dan apabila kegiatan tersebut berupa swadaya masyarakat akan lebih memilih menghindari diri dari kegiatan tersebut. Tetapi pada kegiatan tertentu yang akan direalisasikan, masyarakat kurang dilibatkan karena pada kegiatan yang akan direalisasikan memiliki kriteria tertentu yang bersifat memiliki *skill* atau kemampuan pada bidang tertentu misalnya membuat bangunan atau PLTA, Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk hal tersebut, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat.

Keterlambatan penyaluran dana dari UPK kecamatan ke TPK Desa yang diakibatkan molornya pengajuan RAB oleh UPK dikarenakan kemampuan *supplier* dalam melaksanakan kegiatan pembangunan belum cukup kuat dalam hal materi sehingga tempo pengerjaan kegiatan pembangunan yang dikerjakan *supplier* menjadi molor. Pengerjaan program-program pembangunan yang telah dimusyawarahkan yang semulanya ditargetkan 2 (satu) Minggu

pengerjaan menjadi terlambat bahkan lebih dari 1 (satu) bulan keterlambatan hal tersebut mempengaruhi kinerja UPK dan TPK dan juga perkembangan masyarakat akan pembangunan tersebut juga ikut terpengaruh.

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga turut serta datang, tinggal, mempelajari hidup masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerahnya, dan memberikan arahan serta mengadakan evaluasi terhadap segala aktivitas yang telah mereka laksanakan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dimana untuk kelancaran program tersebut dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat setempat, para pemangku adat/tokoh masyarakat, perangkat daerah dan tentunya pemerintah daerah setempat untuk memberikan informasi dan segala hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan kurang efektif.

2. Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan tidak maksimal.
3. Peluncuran Dana PNPM Mandiri Perdesaan sering mengalami keterlambatan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi fokus sekaligus objek penelitian dalam penyusunan proposal penelitian ini yaitu: Proses Implementasi Program Pembangunan Sarana Prasarana Umum pada aspek Proses Perencanaan Program, Proses Pelaksanaan Program dan Proses Peluncuran Dana PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah di atas, maka penulis menganggap penting memberikan batasan masalah sebagai bahan penelitian yaitu: Bagaimana Proses Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam bidang Pembangunan Sarana Prasarana Umum di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi sarana prasarana umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik khususnya dalam implementasi kebijakan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Implementasi Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau maupun didaerah lainnya secara realistis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan, karena kekurangan lengkap salah satu syarat akan berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan. Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization*, *interpretation*, and *application*.

1. Pengorganisasi (*Organization*)

Pengorganisasi (*organization*) adalah Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksanaan atau alat-alat kerja serta dukungan dengan perangkat hukum yang jelas.

2. Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi (*interpretation*) adalah Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan

tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Aplikasi/Penerapan (*Application*)

Aplikasi/Penerapan (*application*) adalah Aplikasi ialah penerapan secara rutin dan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

Merujuk pada model proses implementasi kebijakan Charles O. Jones, maka variabel yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis program pembangunan sarana prasarana publik PNPM mandiri di Kecamatan Noyan adalah:

1. Pengorganisasi (*organization*)

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan yaitu; Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan / memanfaatkan

media / saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

2. Interpretasi (*interpretation*)

Pada proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat bukan hanya sebagai sasarannya akan tetapi sekaligus sebagai pelaksana kegiatan yang berperan serta baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

3. Aplikasi/Penerapan (*application*)

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai penegasan bahwa karya tulis yang akan ditulis adalah murni tulisan sendiri. Penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan perbandingan yaitu

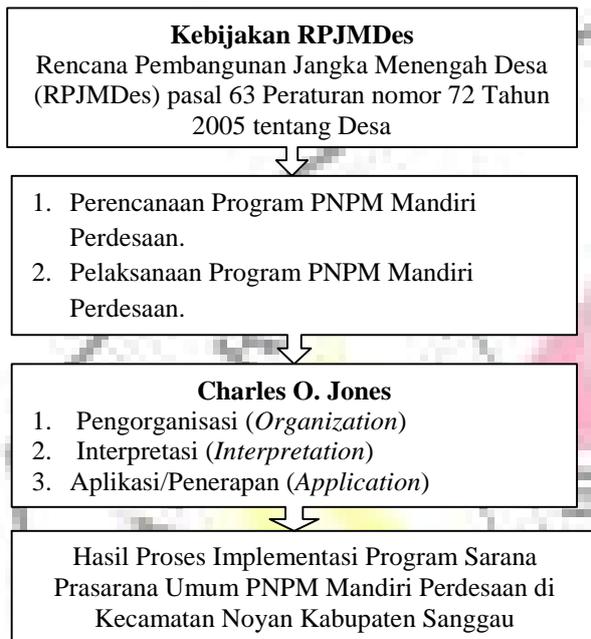
“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna” yang dilakukan oleh Pirdani mahasiswa S1 Fisipol Untan tahun 2013.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yeri Susanto mahasiswa S1 Fisipol Untan pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa ta’as Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak”. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat, selain itu aparat yang terlibat belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga output dari kebijakan belum tercapai secara maksimal.

Selain perbandingan pada fokus penelitian, penelitian ini juga dilaksanakan pada tempat yang berbeda. Akan tetapi terdapat kesamaan pada penelitian ini terutama metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan secara umum penelitian ini sama-sama memfokuskan pada implementasi PNPM Mandiri Perdesaan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pembangunan dan kemiskinan terutama di perdesaan.

2.3. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Peneliti



2.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengorganisasian Dalam Konteks Proses Perencanaan Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana Interpretasi Dalam Konteks Proses Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri

Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau?

3. Bagaimana Aplikasi Dalam Konteks Proses Peluncuran Dana Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau?

C. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskriptif fenomena yang terjadi pada Proses Implementasi Program Sarana Prasarana Umum PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

1. Fasilitator Kecamatan terdiri dari Lima (5)
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.
3. Sepuluh (10) orang dari masyarakat secara acak.

3.3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu: Implementasi Program Pembangunan

Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

3.3. Instrumen Pengumpulan Data

1. Pedoman Wawancara (*Interview*)
2. *Chek List*
3. Alat Dokumentasi

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)
2. Dokumentasi
3. Observasi

3.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis Sebelum di Lapangan
2. Analisis Selama di Lapangan
 - a. Data Reduction (Reduksi Data)
 - b. Data Display (Penyajian Data)
 - c. Conclusion Drawing/Verification

3.6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

1. Triangulasi pada dasarnya merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. a). Triangulasi Sumber Data, b). Triangulasi Teori, c). Triangulasi Metode, d). Triangulasi Peneliti.
2. Teknik triangulasi metode ini biasanya dilakukan oleh seorang

peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

3. Dalam menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode, peneliti mengumpulkan data menggunakan informan dan sumber lapangan yaitu peristiwa, aktivitas dan perilaku; tempat atau lokasi, serta menggunakan arsip dan dokumen.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis

a. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kecamatan Noyan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Sanggau yang terletak pada titik koordinat $1^{\circ} 10''$ Lintang Utara dan $0^{\circ} 35''$ Lintang Selatan serta di antara $109^{\circ} 45''$, $111^{\circ} 11''$ Bujur Timur yang merupakan bagian dari propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Malaysia Timur (Seria, Serawak).

Batas wilayah Kecamatan Noyan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekayam
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Bonti
 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Beduai
 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jangkang atau Kabupaten Sintang
- Kecamatan Noyan berkedudukan di Kabupaten Sanggau dengan pusat pemerintahannya di Desa Noyan Kecamatan Noyan dengan Luas wilayah Kecamatan Noyan 487,90 Km².

Tabel 4.1
 Luas Wilayah Kelurahan / Desa di Kecamatan Noyan Tahun 2015

No	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak Ke Ibukota Kecamatan
1	Desa Noyan	± 68,57	± 0 KM
2	Desa Sungai Dangin	±114,28	±14 KM
3	Desa Semongan	±111,87	±23 KM
4	Desa Idas	±72,79	±23 KM
5	Desa Empoto	±120,46	±20 KM
	Jumlah	±48.790	

sumber: Kantor Camat Noyan, Januari 2016.

b. Keadaan Iklim

Pada umumnya iklim di daerah Kecamatan Noyan adalah beriklim tropis basah (subtropis) mengingat daerah ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya dua

musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Biasanya diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba yaitu terjadinya perubahan cuaca, suhu udara, tingkat kelembaban udara, panjang sinar matahari serta arus angin.

4.1.2 Keadaan Demografi

a. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Noyan Tahun 2015

No	Kelurahan / Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	
		LK	PR		
1	Desa Noyan	1.027	903	1.930	505
2	Desa Sungai Dangin	1.595	1402	2.997	777
3	Desa Semongan	1.069	936	2.005	505
4	Desa Idas	1.010	904	1.914	464
5	Desa Empoto	1.108	970	2.078	503
	Jumlah	5.809	5.115	10.924	2.754

Sumber : kantor Kecamatan Noyan, Januari 2016

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4.3
 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Noyan Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	5.462
2	Pedagang	218
3	Pegawai Negeri Sipil	546
4	Buruh Lepas	874
5	Lain-Lain	3.823
	Jumlah	10.924

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut

Penduduk Kecamatan Noyan berjumlah 10.924 jiwa yang dibagi 90% menganut agama Katolik yaitu 9.832 jiwa, 7% menganut agama Kristen Protestan yaitu sebanyak 765 jiwa dan yang memeluk agama Islam sebanyak 3% yaitu 328 jiwa.

4.1.3 Sarana Transportasi, Komunikasi, dan Kesehatan

1. Sarana Transportasi Darat

Kondisi jalan Darat yang melewati Desa dan Dusun masih banyak jalan tanah. jalan aspal yang ada dalam kondisi rusak parah hanya ± 2 km yang masih dalam kondisi baik sedangkan sarana angkutan yang digunakan mobil dan motor yang jumlahnya semakin bertambah.

a. Sarana Komunikasi

Sebagian besar sarana komunikasi masyarakat Kecamatan Noyan Sampai saat ini masih menggunakan komunikasi tatap muka atau interaksi langsung (tradisional).

b. Sarana Kesehatan

Tabel 4.4
 Jumlah Fasilitas Penunjang Kesehatan Di Kecamatan Noyan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Buah)
1	Pukesmas	1
2	Posyandu	5
3	Polindes	5

Sumber: Kantor Kecamatan Noyan, Januari 2016.

c. Sarana Penerangan

Ada tiga Dusun yang sudah dialiri listrik dari PLN yaitu dusun Noyan, Entubu dan Kojub sedangkan yang belum teraliri listrik yakni : Desa Semongan, Desa Sungai Dangin, dan Desa Empoto. Ada juga yang telah dialiri listrik yaitu Dusun Talogah, Desa Idas, dengan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1. Pengorganisasian Dalam Kontek Proses Perencanaan Program Pembangunan Sarana Prasaran Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

Dalam impementasi program PNPM Mandiri Pedesaan Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka dalam forum musyawarah salah satunya yaitu kegiatan perncanaan partisipatif di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan, dalam forum tersebut Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.

Kemampuan dari masing-masing orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang telah dipilih dan diluangkan dalam struktur organisasi PNPM Mandiri Perdesaan, baik yang bertugas dikecamatan maupun

dimasing-masing desa, akan diuji pada forum musyawarah antar-desa MAD Perengkingan ditingkat kecamatan.

Forum musyawarah antar-desa MAD Perengkingan ditingkat kecamatan merupakan forum penyeleksian/prioritas kegiatan ditingkat desa dan kecamatan. Pada forum tersebut masyarakat melakukan musyawarah ditingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak.

Forum musyawarah antar-desa MAD Perengkingan ini menjadi forum perdebatan dan perbutan pembangunan yang akan diprioritaskan disetiap masing-masing desa dimana desa tersebut dianggap prioritas untuk mendapat bantuan pembangunan yang akan didanai. Dalam upaya untuk mendapatkan bantuan pembangunan yang diprioritas yang akan didanai tersebut membutuhkan TPK-TPK dari perwakilan masing-masing desa yang memiliki strategis yang bagus.

TPK dan UPK beserta Tim lainnya juga berperan mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif dalam merumuskan rencana program kegiatan Prasarana Umum PNPM Mandiri dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengorganisasian suatu program, sikap

implementor merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan suatu program dalam mewujudkan pembangunan sarana prasaran publik PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. UPK harus mensosialisasikan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat supaya tidak ada salah penafsiran tentang program PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM Mandiri Perdesaan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Masalah sarana akses komunikasi menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang faham akan program ini. akses komunikasi yang dimiliki kecamatan sangat minim sehingga untuk berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat setempat sangat sulit, masalah ini yang menyebabkan untuk mendapatkan informasi dari kecamatan baik masyarakat maupun pemerintah kecamatan harus datang secara langsung ke daerah tersebut, akibatnya informasi dari dalam dan dari luar daerah amat sulit untuk didapatkan oleh masyarakat.

Kondisi jalan yang kurang layak untuk ditempuh juga menjadi hambatan bagi baik bagi masyarakat itu sendiri maupun pihak pelaksana (FK, UPK, TPK dan Verifikasi) dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga menjadikan masyarakat sulit untuk

diarahkan, diatur dan diajak kerja sama. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah dikarenakan kurangnya pembangunan sekolah dan tenaga pengajar khususnya di daerah pelosok Dusun Kecamatan Noyan dimana pendidikan yang dirasa sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada disana. Fenomena-fenomena masyarakat tersebut yang menjadikan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di disawah, kebun atau diperusahaan sawit tempat mereka bekerja sehingga jarang menghadirkan segala bentuk sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah.

Pengarahan dan perencanaan yang di musyawarahkan oleh tim implementor PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan Noyan dirasa belum dapat diterima serta dilaksanakan masyarakat sehingga hal ini menyebabkan masyarakat belum mengerti tentang maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan. Masalah tersebut menciptakan pemikiran masyarakat bahwa bantuan yang diberikan sama halnya dengan bantuan masyarakat lainnya seperti RASKIN, BLT dan bantuan masyarakat lain yang diberikan oleh pemerintah.

Proses Perencanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di Desa, di Kecamatan, dan di Kabupaten. Tahap

persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di Desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan Musdes Perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di Kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan.

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD akan mendapat pelatihan.

Musyawarah Penggalian Gagasan merupakan pertemuan kelompok-kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama RTM. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP) oleh kaum

perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa.

Musdes Perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD.

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai dan berapa jumlah dana yang akan dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Namun jika

belum selesai desain dan RABnya, maka MAD penetapan usulan dilakukan pada waktu yang berbeda. Musdes Informasi Hasil MAD ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan.

4.2.1 Interpertasi Dalam Kontek Proses Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Proses dan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.

Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah

tangga yang termasuk kategori miskin/sangat miskin (RTM). Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka.

Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir.

Implementasi Program Pembangunan Sarana Prasaran Publik PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan

Noyan Kabupaten Sanggau banyaknya fasilitas prasaran umum yang tidak terawat sehingga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tersebut rusak parah bahkan roboh/hancur, seperti jalan rabat beton dan jalan-jalan desa yang telah dibuka baru maupun jalan-jalan desa yang telah diperbaiki sebelumnya.

Pembangunan sarana prasaran umum yang telah dibangun pada dasarnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP kegiatan akan tetapi yang menjadikan semua kegiatan pembangunan menjadi tidak optimal adalah dukungan dan partisipasi dari masyarakat, masyarakat mempunyai sifat yang egois dan masa bodoh terhadap semua pembangunan yang merupakan bantuan pembangunan dari pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan baik itu untuk masyarakat maupun pertumbuhan desa.

Masyarakat menjadi tumpuan suatu program berhasil atau justru sebaliknya, masyarakat yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan pada program ini merupakan masyarakat yang susah untuk dikendalikan. Sifat masyarakat yang keras kepala, egois dan masa bodoh menjadikan program ini berjalan lambat dan menghasilkan kinerja yang tidak optimal sehingga hal tersebut yang menjadikan banyaknya kegagalan-kegagalan pada pembangunan yang telah terealisasi.

Kecemburuan sosial juga menjadikan masalah pembangunan yang terealisasi menjadi semakin buruk. Banyak masyarakat yang merasa iri terhadap tim pelaksana kegiatan karena masyarakat beranggapan tim pelaksana kegiatan yang akan memperoleh hasil banyak pada kegiatan yang akan terealisasikan. Masyarakat juga merasa hasil yang akan diperoleh pada pembangunan akan lebih banyak menguntungkan tim pelaksana kegiatan.

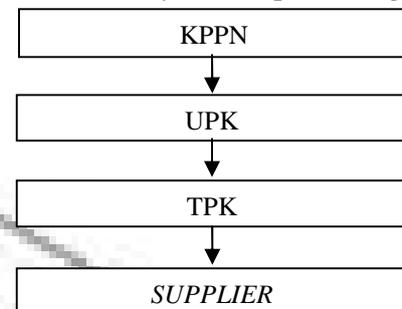
Isentip yang kecil diterima oleh masyarakat atas bantuan pembangunan yang diselenggarakan menjadi masalah internal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan. Hal ini menjadikan kecurigaan masyarakat terhadap tim pelaksana kegiatan. Kecurigaan disini merupakan anggapan masyarakat bahwa hak mereka telah dimakan oleh tim pelaksana kegiatan sehingga royalti yang diberikan masyarakat tidak sepenuhnya ikhlas yang mengakibatkan motivasi kerja menurun.

4.2.2 Aplikasi Dalam Kontek Proses Peluncuran Dana Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau.

Menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd proses

penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan Noyan Kabupaten Sanggau :

Gambar 4.5
Proses Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau



Sumber : Kantor PNPM Mandiri Perdesaan, Februari 2016.

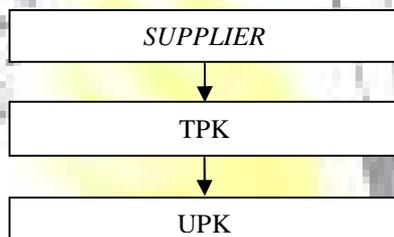
Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dan penyaluran dana. Dimana pada prinsipnya semua proses yang terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM MD di kecamatan dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan, sedangkan kegiatan Pengelolaan dan pengadministrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

PNPM PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/prasarana

penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran, hal inilah penyebab keterlambatan peluncuran dana dari UPK Kecamatan ke TPK Desa. Berikut ini adalah proses permintaan pembayaran dana kegiatan PNPM-MPd Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau:

Gambar 4.7
Proses Permintaan Pembayaran Dana Kegiatan PNPM-MPd Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau



Sumber : Kantor PNPM Mandiri Pedesaan, Januari 2015

Metode yang digunakan dalam penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan adalah 40%, 40% dan yang terakhir 20%. Mekanisme kegiatan pembangunan fisik merupakan tanggung jawab *supplier*. *Supplier* mempunyai hak untuk mengajukan pembayaran sebesar 40% tahap pertama, 40% tahap kedua dan 20% tahap ketiga. Pengajuan pembayaran 20% tahap terakhir merupakan 100% kegiatan telah terealisasi atau telah selesainya kegiatan pembangunan fisik.

Kegiatan pembangunan fisik yang telah di kerjakan *supplier* merupakan wewenang dan kewajiban *supplier* untuk mengerjakan dan menyelesaikannya, apabila kegiatan pembangunan fisik telah mencapai 50% maka akan dibayar 40%, sisanya kemudian akan dibayar setelah kegiatan pembangunan fisik mencapai 80%. Setelah kegiatan pembangunan fisik 80% maka akan dibayar lagi sebesar 40% sisa dari pembayaran tahap pertama, kemudian yang terakhir akan dibayar sebesar 20% sisa dari pembayara tahap pertama dan tahap kedua, pembayaran ini dilakukan apabila kegiatan pembangunan fisik telah mencapai 100% atau selesai.

Pengajuan pencairan dana kegiatan pembangunan fisik tersebut merupakan hak *supplier*. Untuk pengajuan pencairan dana *supplier* mengajukan ke pada TPK Desa terkait dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait kegiatan pembangunan fisik yang telah dikerjakan (nota, faktur dan foto-foto kegiatan) sesuai dengan RPD kemudian TPK Desa mengajukan berkas-berkas tersebut ke UPK Kecamatan untuk dijadikan pertanggungjawaban atas pembanguna fisik yang telah terealisasi.

TPK tetap mengacu pada ketentuan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang telah dikerjakan oleh

supplier. Ketua TPK wajib membubuhkan tanda tangan pada formulir LPD bagi permintaan penyaluran dana dari *supplier* ke TPK.

Keterlambatan penyaluran dana dari UPK kecamatan ke TPK Desa yang diakibatkan lambatnya pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) kegiatan oleh TPK Desa ke UPK Kecamatan dikarenakan keterlambatan *supplier* mengajukan dokumen-dokumen terkait kegiatan pembangunan fisik yang telah dikerjakan (nota, faktur dan foto-foto kegiatan sesuai dengan RPD).

Dokumen tersebut diajukan kepada TPK Desa kemudian TPK Desa mengajukan ke UPK Kecamatan untuk meminta pembayaran atas kegiatan yang telah dikerjakan *supplier/pemborong*. Semua penyaluran dana terkait kegiatan yang melibatkan *supplier/pemborong* bergantung kepada kinerja *supplier/pemborong* sehingga secara tidak langsung TPK Desa dan UPK Kecamatan juga ikut bergantung dalam hal peluncuran dana ke *supplier/pemborong* dengan melihat hasil laporan dari *supplier/pemborong*, apakah telah sesuai dengan RPD, ketersediaan bahan Material dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan pembanguna fisik.

Permasalahan yang terjadi dilapangan pengerjaan program-program

pembangunan yang telah dikerjakan *supplier/pemborong* tidak tepat waktu yang semulanya ditargetkan 2 (dua) Minggu pengerjaan menjadi terlambat bahkan lebih dari 1 (satu) bulan keterlambatan hal tersebut mempengaruhi kinerja TPK dalam menyalurkan dana untuk membayar *supplier*, sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja UPK yang menyebabkan hal lainnya juga ikut terpengaruh seperti perkembangan masyarakat akan pembangunan-pembangunan lainnya yang akan dibangun pada desa tersebut juga ikut terpengaruh.

Mekanisme administrasi yang seperti itulah yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana dari UPK kecamatan ke TPK Desa yang selanjutnya diserahkan ke *supplier/pemborong*. Semua administrasi yang terkait kegiatan pembangunan di PNPM Mandiri Pedesaan saling bergantung satu dengan lainnya sehingga hal tersebut secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri pedesaan.

E. KESIMPULAN

1. Pendampingan dari fasilitator kecamatan dan fasilitator teknik ke desa-desa binaan dirasa belum optimal sepenuhnya dalam mendampingi dan memfasilitasi kegiatan yang akan direalisasikan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dibatasi oleh implementor dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki kriteria tertentu yaitu harus memiliki kemampuan / Skill, latarbelakang pendidikan dan ketelatenan.
3. TPK Desa, UPK Kecamatan dan Supplier memiliki ketergantungan dalam penyaluran dana. Supplier tidak cekatan dalam menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan UPK Kecamatan untuk proses penyaluran dana sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana.

F. SARAN

1. Sosialisasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan.
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan para kader-kader desa yang direkrut agar lebih ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
3. Setiap pelaksanaan kegiatannya terdapat control atau pengawasan yang lebih ketat baik oleh

masyarakat, badan pengawas kegiatan yang telah dibentuk maupun oleh pemerintah daerah.

G. REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung Nugroho, Riant, 2006.

Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.

Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian Kuantitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.

Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Narbuko, C, Achmadi, A, H. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pirdani. 2013. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna*. Fisipol: Universitas TanjungPura.

Susanto, Yeri. 2011. *Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa ta'as Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*. Fisipol: Universitas TanjungPura.

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sumber internet

Tugas pokok dan fungsi kecamatan, diambil pada tanggal 28 september 2015 dari: tarik.sidoarjoab.go.id/tupoksi.html.

Potensi perikanan kabupaten sanggau, diambil pada tanggal 28 september 2015 dari: komunitaspenyuluhperikanan.blogspot.ca/2012/07/potensi-perikanan-kabupaten-sanggau.html?m=1.

PNPM Mandiri Perdesaan Dari Wikipedia bahasa Indonesia, diambil pada tanggal 18 November 2015 dari: https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan.

program berbasis pemberdayaan masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat pnpm mandiri/ diambil pada tanggal 18 November 2015 dari: <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok>.

Dokumen-Dokumen :

Petunjuk Teknisi Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

Rekapitulasi Usulan Kegiatan PNPM-MPd 2013-2014 Kecamatan Noyan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pasal 63 Peraturan nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

RPJM Nasional Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Peraturan daerah kabupaten Sanggau nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ARISTO BAHARI X
 NIM / Periode lulus : E2111051 / 1
 Tanggal Lulus : 26 September 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAH
 Program Studi : IAH
 E-mail address/ HP : bahari.aristocris@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi IAH Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DIKECAMATAN MOYAH KABUPATEN
 SAHIGGAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Disetujui
 dan ditandatangani
 Pengelola Jurnal
 Dr. Pakdi. M.AB
 NIP. 197409052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 8 November 2016
 ARISTO BAHARI X
 NIM. E2111051

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)